

## IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DISTRIK MAKKI KABUPATEN LANNY-JAYA

*Yepilu Wenda<sup>1</sup>*  
*Markus Kaunang<sup>2</sup>*  
*Sofia Pangemanan<sup>3</sup>*

### Abstrak

Implementasi program beras miskin dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan salah satu program dirasakan secara merata oleh masyarakat melalui pelaksanaan program beras miskin ini juga bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat miskin. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras untuk keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat harga bersubsidi dan tempat jumlah yang telah ditentukan dimana setiap kepala keluarga (KK), berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk implementasi program beras miskin di distrik makki kabupaten lanny-jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program beras miskin di Distrik Lanny Jaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah beras yang diterima oleh setiap kepala keluarga penerima manfaat raskin jumlah beras yang masuk di titik distribusi sesuai dengan kepala keluarga penerima manfaat terdaftar sesuai hasil musyawarah tim raskin daerah. Harga beras yang harus dibayar oleh setiap kepala keluarga penerima manfaat raskin adalah sejumlah lima ribu rupiah per kilogram, tidak terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai standar kualitas beras bulog yang menyebabkan kengunaan beras raskin memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

**Kata Kunci : Implementasi, Program, Beras Miskin.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya sebagai kekurangan dan ketidakberdayaan dari para miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di distrik makki berjumlah 4,785 kk dari 7,749 dan berjumlah 4,785 rumah tangga 7,824 (distrik makki, tahun 2017). Adapun program penanggulangan kemiskinan yang sudah implementasikan di distrik makki adalah keluarga miskin, program beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan program bantuan diharapkan kualitas hidup kemandirian dan kesejahteraan fakir miskin dapat terwujud sehingga mereka mampu mengorganisasikan diri untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada di sekitarnya dan mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi khususnya masyarakat miskin. Hasil pengamatan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan program penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) sudah seluruhnya efektif terutama cepat pembayaran dan pendistribusian raskin serta kualitas raskin yang merupakan suatu dari pelaksanaan pemerintah apa lagi dilihat dari aspek penyaluran jumlah kelompok sasaran volume beras

sesuai dengan jumlah RTS yang ada dikampung dan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang harusnya RP. 100.000/per kg setelah ke titik distribusi mencapai RP.2.000 sehingga dapat dipastikan bahwa sudah optimal memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin khususnya di distrik makki kabupaten lanny-jaya. Dengan melihat banyaknya dalam penyaluran raskin kepala rumah tangga miskin maka dengan itu peneliti rasa tertarik mengadakan penelitian untuk diuji kebenaran secara ilmiah melalui penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "implementasi program beras miskin di distrik makki kabupaten lanny-jaya"

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Implementasi

Untuk pengertian Implementasi sedangkan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kelompok rendah, dan semakin meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama. Jika mau jujur, masalah-masalah tersebut dapat berubah menjadi penyebab instabilitas yang sangat membahayakan pelaksanaan pembangunan. Permasalahan tersebut juga membawa pengaruh negatif, seperti semakin melangarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai, serta hubungan antar manusia. Kata Kunci dan. Teorinya menurut Hikmat and Harry (2006:6) menyatakan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. pendapatan bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada

dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menurut. (Supriatna, Nana, dkk (2007:7-8) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan oleh rendahnya tingkat produktivitas kerja, pendapatan, kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidak pemberdayaan. masyarakat bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya implementasi informal. (dalam menurut: Supriatna and Nana, 2007:7-8) mengemukakan 3 karakteristik penduduk masyarakat tersebut adalah.

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri,
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri,
3. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas,

Bank Indonesia World Bank Indonesian Report (2008:11) pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Booth dan Moeljarto ., (2007:10) and Cawley, J. dkk. (2010:6) menyatakan bahwa banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur

dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan Untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya lebih dulu. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah. Kriteria lain yang digunakan untuk mengukur kemiskinan penduduk:

Implementasi pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak untuk justru menekan dan mendesak mereka ke pinggir-pinggir atau ke posisi-posisi ketergantungan Sementara itu (Rondinelli, A. Dennis. 2013:18), mengemukakan ada tiga strategi dasar program yang bertujuan untuk membantu penduduk yakni:

1. Bantuan disalurkan ke tempat dimana mayoritas orang hidup, melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi

- pelayanan yang berorientasi pada penduduk kampung.
2. Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang melalui program kebutuhan dasar manusia.
  3. Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosio ekonomi yang sama mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus berkembang di dalam lingkaran melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu.

## **Pengertian Kemiskinan**

Merupakan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. Kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti faktor sosial dan moral. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada dibawah garis tertentu. secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Namun Kemiskinan identik dengan ketidak mampuan sekelompok masyarakat yang terhadap system yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan ter eksploitasi (kemiskinan struktural). Pada umumnya kemiskinan dengan ketidak mampuan seorang individu memenuhi standar kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Pembahasan ini dimaksud dengan kemiskinan material definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu pada awal tahun 2005 definisi perluas tidak hanya berdasarkan pada tingkat pendapatan, tetapi mencakup ketidak mampuan dibidang kesehatan,

pendidikan dan perumahan. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minuman, seperti sadang, papan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Kemiskinan juga dapat diartikan menurut dua pendekatan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif . kemiskinan absolut diukur dengan suatu standart tertentu, sementara kemiskinan relative bersifat kondisional, biasanya membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan pendapatan kelompok lain sedang kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan tertentu atau mereka berada dibawah garis kemiskinan internasional.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini ingin mengetahui dan memperoleh pemahaman tentang implementasi Program beras miskin di distrik Makki kab lanny- jaya. Selain itu dengan metode ini diharapkan dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah:

1. Sosialisasi program pemberdayaan masyarakat guna penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah distrik makki kepadamasyarakat miskin yang tersebar di distrik makki bagian timur kabupaten lanny-jaya;
2. pelaksanaan program beras untuk masyarakat miskin (raskin) di distrik

makki bagian timur kabupaten lanny-jaya;

3. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di distrik makki bagian Timur kabupaten lanny-jaya.

## Hasil Penelitian

Pada awal penulis pengamatan ini telah disebutkan bahwa tujuan dari pendistribusian Raskin ialah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Oleh karena itu, dalam setiap pendistribusian Raskin perlu sekali diperhatikan dan diawasi sampai ketitik pusat distribusi agar benar-benar tersalurkan dan terhindar dari penyelewengan jatah Raskin. Pendekatan dalam Pelaksanaan program Raskin menggunakan pendekatan yang sangat umum. Dikenal dalam wacana kebijakan publik, padahal keputusan sering kali tidak selaras dengan materi yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai akibat dari gerak perubahan keinginan masyarakat lebih cepat dari respon aparat birokrasi terhadap perubahan itu. (kendala administratif seringkali membuat aparat birokrasi terkesan bekerja lambat), perbedaan karakter sosial antara birokrat dengan masyarakat menyebabkan persepsi mereka berbeda terhadap satu persoalan yang sama. Sungupun demikian juga dua kelemahan lain dari pendekatan *Top-Down* yaitu:

1. Sebuah kebijakan yang dirumuskan secara berkelanjutan walau secara jelas telah dirumuskan, menyulitkan pemerintah menguak nuansa

persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat.

2. Cenderung melahirkan proses kebijakan publik yang tidak demokratis, bahkan sangat mungkin melahirkan rezim politik yang otoritarian. Pembahasan terhadap efektivitas akan difokuskan pada sisi dan lingkungan kebijakan dengan acuan teori. Masing-masing bagian ini akan dibahas berdasarkan fenomena penelitian yang diamati. Proses analisis terhadap fenomena pengamatan dilakukan dengan proses triangulasi baik dari sumber informasi maupun isi informasi.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Raskin yang di tunjukan dengan 6 indikator tersebut masih rendah. Isu terkini didalam penyelenggaraan Negara adalah *Good Governance*. Termasuk kebijakan publik juga harus diletakan didalam kerangka praktek *Good Governance* didalam kehidupan bersama. Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut UNDP yaitu :

- *Participation*. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tumpah pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- *Transparancy*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan harus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka

yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

- *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
- *Consensusorientation*. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal maupun prosedur-prosedur
- *Equity*. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dalam lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* pembangunan semacam ini. (j.steladi, Nugroho :2003:219)

Seharusnya kebijakan program Raskin dalam implementasinya mengacu pada 9 prinsip diatas. Akan tetapi kalau kita lihat dari hasil penelitian, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan bersama-sama,

artinya bisa transparan tapi tidak akuntabel.

Seharusnya disemua wilayah sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Setelah data calon penerima program tersedia, program bantuan keluarga bersyarat dapat dimulai. Persyaratan dapat dikaitkan dengan kriteria keluarga miskin.

Secara teoritis program raskin memang berpotensi sebagai program penanggulangan kemiskinan menyeluruh. Program ini dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan masyarakat saat kondisi perekonomian sedang kritis. Namun demikian, pelaksanaannya memerlukan persiapan, perencanaan serta rencana bangun yang tepat, dan perlu diperhatikan masalah yang berkaitan dengan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah serta persoalan strategi pengakhiran program (*exit strategy*.) selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan penerapan program pemberian bantuan keluarga miskin. *Pertama*, diperlukanya percontohan dengan skala kecil sebelum program ini dijalankan secara nasional. *Kedua*, bahwa program bantuan keluarga miskin yang lain hendaknya bisa memberdayakan masyarakat miskin agar mereka kelak bisa keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, pemberdayaan keluarga miskin merupakan salah satu faktor kunci bagi

perbaikan kesejahteraan secara umum yang juga perlu mendapat perhatian.

Harapan terbesar dari pelaksanaan program Raskin ini adalah sesuai dengan tujuan program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Akan tetapi diharapkan pula pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin tersebut, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

## Kesimpulan

- Jumlah beras yang diterima oleh setiap kepala keluarga penerima manfaat raskin dapat tepat jumlah karena jumlah beras yang masuk di titik distribusi sesuai dengan kepala keluarga penerima manfaat terdaftar sesuai hasil musyawara tim raskin daerah.
- Harga beras yang harus dibayar oleh setiap kepala penerima manfaat raskin adalah RP. 50,000/kg dititik pendistribusian harus membayar dengan harga RP. 100,000 untuk menutupi biaya miskin pengangkutan dari kampung ke titik pendistribusian raskin sehingga harga dapat tepat harga.
- Tidak terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai standar kualitas beras bulog yang menyebabkan kengunaan beras raskin memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik hanya untuk campuran saja. Sosialisasi internal (pelaksanaan/aparat kampung) dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin) dalam koordinasi antara instansi terkait dikampung antara lain.

- Dapat diharapkan dari berbagai pihak aparat mensosialisasikan kegiatan ini dengan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar, akan tetapi jika dilihat dari hasil analisis di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat dan aparat pelaksanaan sudah terbiasa dengan kegiatan ini sehingga minimnya sosialisasi yang dilakukan aparat pelaksanaan raskin, yang menyebabkan pelaksanaan dilapangan berjalan dengan lancar dan rencana sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Adanya penggunaan media seperti media masa untuk mensosialisasi program raskin lebih efektif untuk menjangkau masyarakat penerima manfaat untuk memperoleh informasi tentang program raskin serta hak dan kewajiban masing-masing.

## Saran

- Program raskin sebaiknya diarahkan untuk membuat masyarakat miskin menjadi mandiri, dan bukan lagi sebagai program darurat (emergency program) dan karitatif semata, melainkan merupakan program yang terencana dan terkoordinasi antar pusat dan daerah menuju ketahanan pangan nasional atau dengan kata lain, program raskin diharapkan dapat dikembangkan menjadi program kesejahteraan sosial (social welfare program).
- Masih diperlukan pendataan ulang terhadap masyarakat penerima beras raskin sehingga seluruh keluarga miskin di kampung dapat memperoleh jatah beras raskin.
- Secara umum pelaksanaan raskin yang sudah berjalan hampir delapan tahun ini perlu dievaluasi, sudah yang

tersedia akan lebih baik jika dialokasikan untuk program lain yang lebih memberdayakan masyarakat.

- Untuk menunjang kegiatan program raskin sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif seperti rapat kondisi, media masa, dan media lainnya yang dapat menjangkau masyarakat untuk informasi-imformasi raskin di kampung.

## DAFTAR PUSTKA

- Abdul Hakim 2010. *Statistika Dekriptif*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai*.
- Bagong, Suyanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Media Group. *Media. memaknai Analisis Jalur*. Bandung: Alfabeta
- Menuju Sejahtera*. Yogyakarta: Sidje Books
- Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Bank Dunia, World Bank Development Report 2008. Washington DC, USA. Bayu Media Publishing.
- Fana Noana 2008. *Studi Konpratif Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan*
- Seeudah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Ace Timur*.
- J. Steladi, Nugroho 2003. *Perilaku Konsumen Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian*.
- Hastadewi, Yuli, dkk., 2006. *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak Pada Beberapa Sektor*.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. Bandung Humaniora.
- Miles, Huberman 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Metode*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moeljarto, T. 2007. and Cawley, J. dkk., 2010. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep*.
- Republik Indonesia 2004, *Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jakarta*.
- Rondinelli, A. Dennis. 2013. *Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu*.
- Sudibyo Supardi, Nani Sukasediati, 2014. *Pola Penggunaan Obat Dan Obat Tradisional Dalam*. Supriatna, Nana, dkk. 2007. *IPS Terpadu*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama Tim Penyusun.
- Undang-Udang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.